

**PERKEMBANGAN SEKOLAH GURU B (SGB)
DI SUMEDANG TAHUN 1950-1961**

JURNAL



Oleh:

**Ayu Nenden Masden Badinah
13407144008**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

PERKEMBANGAN SEKOLAH GURU B (SGB) DI SUMEDANG TAHUN 1950-1961

Penulis 1 : Ayu Nenden Masden Badinah
Penulis 2 : Danar Widiyanta, M.Hum
Universitas Negeri Yogyakarta
Ayunenden_mb@yahoo.com

ABSTARK

Sekolah Guru B (SGB) adalah salah satu pendidikan guru yang berkembang pada awal kemerdekaan Indonesia. Lamanya pendidikan SGB yaitu 4 tahun setelah SR. Pada dasarnya SGB ini bertujuan untuk menanggulangi kekurangan guru pada tingkat pendidikan rendah. Pemerintah mengadakan beasiswa ikatan dinas untuk menarik simpati masyarakat agar bersekolah di SGB. Dalam rangka pemerataan untuk menanggulangi kekurangan guru, maka dibangunlah SGB di setiap kabupaten di Indonesia, termasuk di Sumedang. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perkembangan SGB di Sumedang dari awal pembukaannya yaitu tahun 1950 hingga ditutup tahun 1961.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis, dengan metode sejarah meliputi empat langkah. Pertama, heuristik yaitu merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua, kritik sumber merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi yaitu dengan mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong didirikan SGB di Sumedang adalah kekurangan guru yang terjadi di awal kemerdekaan Indonesia yang mengakibatkan penderita buta huruf semakin banyak. Pemerintah kemudian mendirikan SGB di setiap kabupaten untuk menanggulangi kekurangan guru. Dibangunlah SGB yang pertama di Sumedang tahun 1950. Berbagai kebijakan pun ditempuh untuk kemajuan SGB hingga akhirnya SGB di Sumedang terpilih sebagai *Pilot Project*. Dampak yang ditimbulkan dari SGB di antaranya penyerapan tenaga kerja, munculnya kos-kosan, meningkatnya status sosial para lulusan SGB menjadi *priyai guru*, munculnya Kursus Guru B (KGB), teratasinya kekurangan guru di Sumedang. Akan tetapi masalah lain yang kemudian muncul di antaranya terjadinya *surplus guru* sehingga beban pemerintah semakin besar untuk menggaji para guru baru lulusan SGB.

Kata Kunci: *Perkembangan, SGB, Sumedang.*

THE DEVELOPMENT OF TEACHER SCHOOL B (SGB) IN SUMEDANG YEAR 1950-1961

ABSTRACT

School Teacher B (SGB) is one of the teacher education that developed in early Indonesian independence. The duration of SGB education is 4 years after SR. Basically, this SGB aims to overcome the lack of teachers at the low level of education. The government held an official bond scholarship to attract public sympathy to study in the SGB. In the framework of equity to overcome the lack of teachers, then built SGB in every district in Indonesia, including in Sumedang. The purpose of this paper is to know the development of SGB in Sumedang from the beginning of the opening of the year 1950 until closed in 1961.

This study uses critical historical research methods, with the historical method includes four steps. First, heuristics is the stage of collecting data or relevant historical sources. Second, source criticism is the stage of assessment of the authenticity and credibility of sources obtained from the physical and the source content. Third, the interpretation is by looking for related relation between the facts that have been obtained so that more meaningful. Fourth, historiography or writing is the delivery of synthesis in the form of historical works.

The results of this study indicate that the driving factor established SGB in Sumedang is a shortage of teachers who occurred in early Indonesian independence which resulted in more and more illiterate people. The government then established SGB in each district to tackle teacher shortages. SGB built the first in Sumedang in 1950. Various policies were taken to progress SGB until finally SGB in Sumedang selected as Pilot Project. The impacts of SGB include the absorption of labor, the rise of boarding house, the increasing social status of the SGB graduates become priyai teachers, the emergence of Teacher B Course (KGB), the lack of teachers in Sumedang. However, other problems that arise include the surplus of teachers, resulting in greater government burden to hire new teachers of SGB graduates.

Keywords: Development, SGB, Sumedang.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan diri seseorang, tiga aspek dalam kehidupannya yaitu pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup.¹ Permasalahan pendidikan di awal kemerdekaan Indonesia yaitu tingginya penderita buta huruf. Dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, dibuatlah undang-undang pendidikan yang disahkan oleh Pemerintah RI pada tanggal 12 Maret 1954. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 menjelma menjadi UU No. 12 tahun 1954 sebagai penyempurnaan UU pokok pendidikan.²

Rakyat menuntut keadilan yang merata dalam penyelenggaraan pendidikan, tahun 1950 Menteri PP dan K mulai membenahi sistem pendidikan yang sempat mengalami kemunduran. Dibuatlah program Rencana 10 Tahun Kewajiban Belajar sebagai cara untuk menanggulangi buta huruf dengan menambah bangunan dan guru. Pada tahun 1950 Indonesia membutuhkan tenaga guru yang besar yaitu sebanyak 19.816 orang.³ Di samping itu masih terdapat 50.200 orang guru yang harus ditingkatkan pendidikannya.

¹ Sani Susanti, "Membangun Peradaban Bangsa Melalui Peningkatan Peran Lembaga Pendidikan dan Guru", *Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2016), hlm. 79.

² A.B. Lopian, dkk., *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), hlm. 263.

³ Ing. Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 90.

Langkah selanjutnya yang diambil Kementerian PP dan K untuk menanggulangi kekurangan guru yaitu dengan menyelenggarakan Sekolah Guru C (SGC), Sekolah Guru B (SGB), dan Sekolah Guru A (SGA). Masing-masing pendidikan guru itu lamanya dua, empat, dan enam tahun setelah Sekolah Rakyat. Kementerian PP dan K kemudian mengadakan Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB) pada tahun 1950.

Perkembangan selanjutnya SGB didirikan di setiap kabupaten di seluruh Indonesia untuk menanggulangi kekurangan guru. Di Jawa Barat, SGB didirikan di Serang, Purwakarta, Depok, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Cicalengka, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, dan Kuningan.⁴ Di Sumedang didirikan enam SGB yang pendiriannya dilakukan secara bertahap antara lain: SGBN I Sumedang, SGBN II Sumedang, SGBN III Sumedang, SGBN IV Sumedang, SGBN V Sumedang, dan SGBN Situraja.

B. FAKTOR PENDORONG DIDIRIKAN SGB DI SUMEDANG

Terdapat beberapa faktor yang mendorong didirikannya Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang. *Pertama*, Revolusi Fisik mengakibatkan banyaknya tenaga guru yang meninggalkan tugasnya dan menggabungkan diri dengan laskar perjuangan untuk melawan Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu situasi pendidikan tidak kondusif sehingga di sebagian daerah kegiatan pendidikan sempat terhenti. Para guru

⁴ Edi S. Ekajati, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986), hlm. 120.

yang menggabungkan diri ke laskar perjuangan sebagian tidak kembali lagi mengajar sehingga jumlah guru semakin berkurang. *Kedua*, seiring dengan diambil alihnya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), mengakibatkan sebagian besar guru berkebangsaan asing ikut juga pergi meninggalkan Indonesia. Di sisi lain, hampir tidak ada orang Indonesia yang mengajar di sekolah lanjutan, karena kebanyakan guru-guru sekolah lanjutan adalah orang berkebangsaan asing. *Ketiga*, keterbatasan pendidikan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Pendudukan Jepang membuat rakyat miskin semakin tidak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan. Diperparah lagi dengan sempat terhentinya pendidikan pada masa Revolusi Fisik mengakibatkan jumlah rakyat yang tidak mendapatkan pendidikan semakin banyak sehingga rakyat yang mengalami buta huruf semakin banyak pula. *Keempat*, tuntutan rakyat untuk memperoleh pendidikan. Tuntutan rakyat menagih janji pemerintah yang akan memberikan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Pasal 10 dan 17. Pemerintah mengadakan Program Kewajiban Belajar sebagai cara pemerintah untuk menanggulangi kekurangan bangunan, dana, dan guru. *Kelima*, kebijakan pembangunan Sekolah Guru B (SGB) di setiap kabupaten di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kekurangan guru di Indonesia. *Keenam*, peran priyai Sumedang yang sebagian besar menjabat di bangku pemerintahan segera melaksanakan pembangunan SGB dengan tidak terlepas dari bantuan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG).

Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang pertama kali didirikan pada tanggal 1 Agustus 1950, bertempat di Jalan Raya, Kecamatan Sumedang Selatan. Sekolah Guru B yang pertama ini dinamai SGBN I Semedang dengan direktornya Raden Abeg Sukandi. Seiring dengan semakin banyaknya para murid baru yang mendaftar ke SGB, maka dibuka SGBN II Sumedang pada tanggal 1 Juli 1952, bertempat di Jalan Arif Rakhman Hakim, Kecamatan Sumedang Utara. Direktur SGBN II Sumedang yaitu Ukas Wiradinata. Kemudian seiring dengan kebijakan pemerintah tentang penghapusan KPKPKB, maka mulai 1 Juli 1953 diadakan SGBN III Sumedang yang menempati bangunan KPKPKB di Jalan Kebon Kol, Kecamatan Sumedang Selatan. Direktur SGBN III Sumedang yaitu Hadjar Purwa Sasmita. SGBN III membangun ruangan kelas lagi di Jalan Regol untuk menampung para murid. Sekitar tahun 1953/1954 dibukalah SGBN IV Sumedang dengan direktornya Sulwin Tirtakusuma, yang menjadi pecahan dari SGBN I Sumedang. Di tahun 1954, SGBN II Sumedang mengadakan SGBN V Sumedang, karena sudah tidak mampu lagi menampung murid baru, dengan direktornya M. Sanusi Tritasutisna. Ke lima SGB (I sampai V) tadi bertempat di *dayeh*. Kemudian di tahun 1954 dibangun pula SGBN Situraja yang berada di Kecamatan Situraja, dengan direktornya Raden Ende Wiradisastra.

C. PENGELOLAAN SGB DI SUMEDANG

Para tenaga pengajar di SGB berasal dari lulusan SGA, PGSLP, dan B I. Mereka tidak hanya berasal dari Sumedang bahkan ada pula yang didatangkan dari kota-kota lain seperti Bandung, Tasik, dan Semarang. Hal ini dikarenakan

sebelumnya Sumedang tidak ada sekolah guru yang mengajar sekolah lanjutan, sehingga perlu bantuan guru dari daerah lain. Guru-guru yang berasal dari daerah lain tempatnya mengajar, disediakan rumah dinas untuk mereka supaya proses mengajar tidak terhambat karena jarak dari rumah guru ke sekolah sangat jauh.⁵

Tabel 1
Tenaga Pengajar SGB Sumedang

Nama Guru SGB di Sumedang					
SGBN I	SGBN II	SGBN III	SGBN IV	SGBN V	SGBN Situraja
R. Abeg Sukandi	Ukas Wiradinata	Hajar Purwa Sasmita	Sulwin Tirtakusuma	M. Sanusi Tritasutisna	Ence Sukanadinata
R. Kosim A Sudrajat	Tuti Sahrial	Rahman E Mustofa	Jamil Pepen	Amarullah Hanifah	Ruhimat Aminah
Sastramiharja	Oman	Khadijah	I.Djumhur	Yeyet	Cicih
E. Pangasih	Kosasih	Edi Ningtyas	Obih	Arta	Nurmala
Onoy Rohaeni	Uhud	Mubini	Suep	Sopandi	Enjon
Eja	Amarullah	Johar Manik	Entin	Tubarsih	Suhud
Tuti Juhaeti	Yeyet	Suganda	Cucu	Oman	Ahud
Eti Aswati	Cicih S	Kartiwa	Rosadi	Jaya	Omo
Yakub	Cicih S	Yoyo	Maemunah	Ali	Amir S
Edi Jubaedi	Karma	Tatim	Juju	Tating	Oday Sudaya
Ojon	Sulaeman	Tarya	Aminah	Hayati	Romli
Subagio	Engkos	Adun	Nurmala	Tating	Ojon
Qunuti	Mamah	R. Robiah S	Memeh	Sutama	Saca
Yuliati	Yakub	-	Nunung	Dinarsih	Umar
Hidayat	Ahud	-	-	Juharja	Ali
Harja	-	-	-	Rustama	Sabri
Ence S	-	-	-	Kidi	Eje
-	-	-	-	Katmah	Sukmana
-	-	-	-	Quraisin	-

Sumber: Wawancara dari murid SGB I (Eneh, Titi Suharyati, dan Nani Sumarni), SGB II (Eman Sulaeman dan Komod Sasmedi), SGB III (Edom Sopandi dan Amad Suparyat), SGB IV (Mamah dan Uyi), SGB V (S.R. Tejasukmana, Entin Suharyatin, dan Jono Salno), dan SGB Situraja (Acih, Adung, Sarip, dan Epon).

Para murid yang mendaftar ke SGB Sumedang tidak hanya dari lulusan

Sekolah Rakyat (SR) saja, melainkan dari Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar

⁵ Acih, wawancara di Sumedang, 20 Februari 2017.

ke Kewajiban Belajar (KPKPKB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di Sumedang pendaftaran ke SGB berpusat di SGB I Sumedang, di sana akan dilakukan penyeleksian dari nilai-nilai yang tercantum dalam ijazah, siswa yang diterima akan ditempatkan berdasarkan keputusan pihak sekolah, baik itu di SGBN I, SGBN II, SGBN III, SGBN IV, SGBN V, maupun SGBN Situraja.⁶

Setelah diterima menjadi murid SGB, pada tahun pertama para murid diharuskan membayar uang pangkal untuk membangun ruang kelas. Penetapan uang pangkal di Sumedang diseragamkan, baik itu di SGB I, SGB II, SGB III, SGB IV, SGB V dan SGB Situraja. Besarnya uang pangkal berdasarkan kesepakatan yang dibuat Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG).

Tabel 2
Besarnya Uang Pangkal SGB Sumedang Tahun 1952-1957

Angkatan	Besarnya Uang Pangkal
1952-1956	Rp. 100
1953-1957	Rp. 275
1954-1958	Rp. 710
1955-1959	Rp. 805
1956-1960	Rp. 500
1957-1961	Rp. 500

Sumber: Wawancara dari murid SGB I (Eneh, Titi Suharyati dan Nani Sumarni), SGB II (Eman Sulaeman dan Komod Sasmedi), SGB III (Amad Suparyat), SGB IV (Mamah dan Uyi), SGB V (S.R. Tejasukmana, Entin Suharyatin dan Jono Salno), dan SGB Situraja (Acih, Adung, Sarip, dan Epon).

Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) mampu menghasilkan gedung-gedung sekolah lebih banyak dibandingkan yang telah dibangun oleh

⁶ Pada awal pendirian tahun 1954, murid baru SGBN Situraja harus mendaftar ke SGBN I Sumedang, akan tetapi mulai dari angkatan ke dua tahun 1955, murid baru yang mendaftar ke SGBN Situraja tidak perlu mendaftar ke SGBN I Sumedang.

pemerintah. Kebanyakan dari orang tua murid berlatar belakang sebagai petani, mereka menggadaikan atau menjual harta bendanya berupa sawah, hasil pertanian, sepeda, domba untuk membayar uang pangkal. Para orang tua berani menyekolahkan anaknya ke SGB dengan membayar uang pangkal yang cukup mahal pada waktu itu karena ada jaminan ikatan dinas bagi anaknya yang diharapkan akan meringankan tanggungan sekolah perbulannya.

Ikatan dinas adalah pemberian tunjangan kepada pelajar-pelajar sekolah lanjutan yang bersedia sesudah pendidikannya selesai diwajibkan menjadi guru pegawai negeri pada sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh PP dan K. Berdasarkan Putusan Menteri PP dan K tanggal 19 Mei 1952 No. 17009/Kab. Pasal 4 Ayat (1b) bahwa tunjangan pokok yang diterima pelajar SGB sebesar Rp.85,⁷ ditambah tunjangan kemahalan. Di Sumedang para pelajar SGB menerima tunjangan ± Rp. 144,⁸ perbulan itu sudah termasuk tunjangan pokok dan tunjangan kemahalan. Awalnya pemberian tunjangan ikatan dinas diberikan pada semua pelajar yang belajar di SGB Sumedang. Akan tetapi, di tahun-tahun terakhir penutupan SGB di Situraja, hanya beberapa pelajar yang mendapatkan tunjangan ikatan dinas. Mulai angkatan ke dua SGB di Situraja tahun 1955 hanya 40 orang yang diberi tunjangan ikatan dinas, dari jumlah seluruh ± 160 orang pelajar yang terdiri dari 4 kelas. Pemberian tunjangan ikatan dinas ini berdasarkan peringkat prestasi murid pertiap angkatan. Hal

⁷ *Pewart* PPK., “Peraturan tentang Pemerian Tunjangan Ikatan Dinas Kepada Pelajar² Sekolah Lanjutan dan Kursus² Sedarajat”, no. 22, November 1952, hlm. 29.

⁸ Sarip, wawancara di Sumedang, 17 Oktober 2016.

ini pun berlaku hingga angkatan ketiga dan keempat di SGBN Situraja. Pelajar ikatan dinas mendapat beberapa keuntungan, diantaranya bebas dari kewajiban membayar uang sekolah, uang alat-alat pelajaran, uang ujian dan pemeliharaan kesehatan. Keuntungan lain menjadi pelajar ikatan dinas yaitu menempati asrama yang diselenggarakan oleh sekolah.⁹ Di Sumedang terdapat dua asrama partikular yang diperuntukan untuk para pelajar ikatan dinas, yaitu asrama Kartini dan asrama Putra. Penyelenggaraan asrama bagi para pelajar sekolah lanjutan ikatan dinas diatur dalam Putusan Menteri PP dan K No.1558/BIII.

Minat masyarakat yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya ke Sekolah Guru B (SGB) mengakibatkan jumlah SGB di Sumedang paling banyak dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, sehingga SGB Sumedang dipilih menjadi *Pilot Project* atau SGB Perintis. Tujuan utama *Pilot Project* ialah untuk menciptakan hubungan yang erat antara sekolah dan masyarakat sehingga terciptalah sekolah guru yang memiliki fungsi kemasyarakatan.¹⁰ Kegiatan *Pilot Project* berupa pelatihan pertanian, pertukangan, peternakan, perikanan, industri kecil, koperasi dan sebagainya.

Pembiayaan gedung SGB beserta perabot dan perlengkapan lainnya dipikul oleh daerah, sedangkan gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya dibiayai oleh

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, (Semarang: Toha Putra, 1975), hlm. 65.

Pemerintah Pusat.¹¹ Permasalahan biaya untuk gedung dan perlengkapan sekolah dibicarakan dalam rapat POMG. Pada awal pendirian SGB Sumedang, ruangan kelas masih jauh dari kata cukup, sehingga kegiatan pembelajaran dibagi pagi dan siang. Bahkan ada pula yang menumpang di sekolah lain untuk memperlancar kegiatan proses belajar. Fasilitas diadakan secara bertahap untuk mendukung pembelajaran di SGB diantaranya gedung permanen dan semi-permanen, meja, kursi, papan tulis, alat kesenian (gamelan), alat olahraga, dll. Tempat untuk mata pelajaran olah raga di SGB I, II, III, IV, dan V dilakukan di Alun-alun Sumedang, sedangkan SGB Situraja di Alun-alun Situraja dan di lapangan Tanuwijaya.

Pelaksanaan kurikulum pada Sekolah Guru B (SGB) selaras dengan tujuan pendidikan menengah kejuruan tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, dalam Pasal 7 Ayat (3). Mata pelajaran yang diajarkan di SGB Sumedang diantaranya: Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, Bahasa Inggris, Ilmu Pasti, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Tata Negara, Menggambar, Menulis, Seni Suara, dan Pendidikan Jasmani¹² yang diajarkan di kelas 1 hingga kelas 3 SGB. Ketika kelas IV murid SGB diajarkan Ilmu Pendidikan dan Praktek Mengajar. Dalam mempersiapkan untuk menjadi guru, para murid SGB kelas IV diharuskan melakukan praktek mengajar di

¹¹ Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 48.

¹² *Arsip Pribadi S.R. Tedja Sukmana.*

Sekolah Rakyat dan Sekolah Rakyat Latihan (SRL) yang telah ditentukan.¹³ Praktek mengajar dilaksanakan setiap seminggu sekali. Sekolah-sekolah yang dijadikan tempat praktek para murid SBG Sumedang diantaranya SR Situ, SR Sinangjati, SR Tegalkalong, SRL Sinangraja, SR Situraja, dan SR Pasirimpun. Para murid SGB tidak hanya dilatih mengajar tapi dilatih pula bagaimana cara mereka bersikap dan berpakaian sebagai guru.

Dalam mencapai suatu tingkatan tertentu, para murid diharuskan menempuh ujian. Sistem ujian untuk mendapatkan ijazah SGB, dibagi ke dalam dua cara yaitu melalui ujian penghabisan dan ujian persamaan.¹⁴ Pertama, ujian penghabisan, ujian ini berlangsung sampai dengan tahun 1958, terdiri atas dua bagian yaitu bagian I tentang pengetahuan umum untuk calon dari kelas 3 (tiga) SGB dan bagian II ujian keahlian sebagai pendidik dan pengajar bagi calon kelas 4 (empat). Murid yang mendapatkan nilai yang baik di ujian bagian I, dapat melanjutkan ke Sekolah Guru A (SGA) di Bandung atau di Bogor untuk wilayah Jawa Barat. Kedua, ujian persamaan diperuntukan bagi mereka yang tidak lulus di ujian penghabisan dan para guru berijazah rendah dari SGB untuk memperoleh ijazah yang sederajat dengan ijazah SGB. Calon-calonna dari Rukun Belajar untuk mencapai ijazah SGB (RBB) atau dari Kursus Lisan Persamaan SGB (KLPSGB) yang biasanya terdapat di setiap kabupaten.

¹³ *Pewartia PPK*, "Warta Berita Pendidikan", no. 23, Desember 1952, hlm. 34.

¹⁴ M. Hassan Oetojo, ed., *Triwarsa*, (Jakarta: Urusan Naskah/Majalah Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960), hlm. 291.

Kabupaten Sumedang menjadi penghasil lulusan SGB terbanyak di Jawa Barat. Bahkan orang-orang seringkali menyebut Sumedang sebagai daerah *pamopokan guru* atau gudangnya guru. Sejak tahun 1954, Sumedang telah menempatkan lulusannya di berbagai daerah di Jawa Barat, diantaranya Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, Bandung, Garut, Majalengka, Sukabumi, Cianjur, Bogor dan Banten.¹⁵ Di wilayah Jawa Barat sendiri lulusan SGB paling banyak ditempatkan di daerah Banten, karena pada tahun 1957 saja Sumedang telah mengirimkan 400 guru lulusan SGB ke Banten. Selain itu, lulusan SGB dari Sumedang pun ditempatkan di luar wilayah Jawa Barat, seperti Sumatra dan Papua, akan tetapi jumlahnya sedikit.

D. DAMPAK KEBERADAAN SGB DI SUMEDANG

Dampak dari keberadaan SGB di Sumedang di antaranya terserapnya tenaga kerja, munculnya kos-kosan yang didirikan oleh penduduk sekitar SGB sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu dampak bagi para murid SGB diantaranya meningkatkan penghasilan mereka dan terjadinya mobilitas sosial vertikal dari anak petani menjadi seorang *priyai guru*. Keberadaan SGB juga berdampak pada perkembangan pendidikan, yaitu diadakannya Kurus Guru B (KGB) yaitu kursus untuk mendapatkan ijazah SGB bagi para *guru toge*¹⁶ dan para murid

¹⁵ Wilayah Banten pernah menjadi bagian Provinsi Jawa Barat, tapi sejak tahun 2000 menjadi wilayah pemekaran, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000.

¹⁶ *Guru toge* adalah guru yang berijazah Sekolah Rakyat.

SGB yang belum lulus ujian penghabisan. Keberadaan SGB ini, tidak hanya berdampak positif seperti yang dijelaskan di atas, tapi juga berdampak negatif yang menjadi penyebab dihapuskannya SGB di Sumedang tanggal 31 Juli 1961. Penyebab dihapuskannya SGB di antaranya kekurangan dana pendidikan mengakibatkan beban anggaran yang harus ditanggung Kementerian PP dan K semakin besar dari tahun ke tahun karena banyaknya guru baru lulusan SGB. Alasan lain dihapuskannya SGB yaitu kualitas lulusan SGB yang dianggap memiliki mutu yang kurang sebagai guru SR, sehingga mereka perlu ditingkatkan kualitasnya dengan meningkatkan taraf guru SR dari lulusan SGB menjadi lulusan SGA.

Proses penutupan SGB telah berlangsung sejak 1 Agustus 1958 dilakukan secara bertahap karena masih terdapat para murid SGB yang akan lulus pada tahun 1958, 1959, 1960 dan 1961. Barulah sejak kelulusan terakhir SGB, yaitu tanggal 31 Juli 1961 semua SGB dihapuskan dan dialihfungsikan menjadi sekolah jenis lain sesuai Keputusan Menteri PP dan K tanggal 22 Juli 1959 No. 69691/s. Sekolah Guru B Negeri I Sumedang beralihfungsi menjadi SMEP sekarang bangunannya ditempati oleh SMP 4 Sumedang.¹⁷ Sekolah Guru B Negeri II Sumedang beralihfungsi sejak tanggal 10 Agustus 1960 menjadi SMEA, sekarang bangunannya ditempati SMKN II Sumedang.¹⁸ Sekolah Guru B Negeri III Sumedang belum ditemukan datanya. Sekolah Guru B Negeri IV Sumedang, berdasarkan Surat Urusan Pendidikan Guru

¹⁷Nani Sumarni, wawancara di Sumedang, 19 Februari 2017.

¹⁸S.R.Tejasukmana dan Entin, wawancara di Sumedang, 17 Oktober 2016.

Jawatan Pendidikan tertanggal 20 Maret 1959 No.30/Urs/K/IPPO/59 beralihfungsi menjadi SMPN II Sumedang,¹⁹ tapi berdasarkan hasil wawancara bangunan SGBN IV Sumedang sekarang ditempati oleh SMAN I Sumedang.²⁰ Sekolah Guru B Negeri V Sumedang dialihfungsikan menjadi SPG, sekarang ditempati oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) cabang Sumedang.²¹ Sekolah Guru B Negeri Situraja beralihfungsi menjadi SMPN Situraja.

C. KESIMPULAN

Sekolah Guru B (SGB) diadakan pada tahun 1950 di Sumedang untuk menanggulangi kekuarangan guru Sekolah Rakyat (SR). Pendirian SGB dilakukan secara bertahap. Seiring dengan tingginya para lulusan SR di Sumedang yang ingin masuk ke SGB, hingga SGB di Sumedang berjumlah enam, di antaranya SGBN I Sumedang, SGBN II Sumedang, SGBN III Sumedang, SGBN IV Sumedang, SGBN V Sumedang, dan SGBN Situraja. Berbagai kebijakan untuk memajukan SGB pun diterapkan seperti terkait tenaga pengajar, murid, ikatan dinas, *pilot project*, fasilitas, kurikulum, sistem ujian, penempatan lulusan, penutupan SGB dan dampaknya hingga SGB beralih fungsi menjadi sekolah jenis lain yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumedang.

¹⁹Arsip SMPN VI Yogyakarta.

²⁰Uyi, wawancara di Sumedang, 16 Oktober 2016.

²¹Jono Salno, wawancara di Sumedang, 21 Februari 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Pribadi S.R. Tedja Sukmana*. Berisi tentang Idjazah Sekolah Guru 4 (empat) tahun (SGB) V Sumedang, 1956.
- Arsip SMPN VI Yogyakarta*. Berisi Surat Keputusan Menteri PP dan K tahun 1960 No. 187/S.K/B/III untuk melaksanakan keputusan Menteri PP dan K tanggal 22-7-1959 no.69691/S tentang melaksanakan penghapusan SGB di seluruh Indonesia secara berangsur-angsur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1960.
- Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, Semarang: Toha Putra, 1975.
- Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Edi S. Ekajati, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986.
- Djumhur, I. dan H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu Bandung, 1976.
- Hassan Oetojo, M., ed., *Triwarsa*, (Jakarta: Urusan Naskah/Majalah Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960), hlm. Lopian, A.B. dkk., *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.
- Pewarta PPK.*, “Peraturan Umum tentang Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan bagi Sekolah Lanjutan dalam Lingkungan Kem. PP dan K”, no.15, April 1952.
- Pewarta PPK.*, “Peraturan tentang Pemerian Tunjangan Ikatan Dinas Kepada Pelajar² Sekolah Lanjutan dan Kursus² Sedarajat”, no. 22, November 1952.
- Pewarta PPK.*, “Warta Berita Pendidikan”, no. 23, Desember 1952.
- Sani Susanti, ”Membangun Peradaban Bangsa Melalui Peningkatan Peran Lembaga Pendidikan dan Guru”, *Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2016.

Wardiman Djojonegoro, Ing., *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.


DAFTAR RESPONDEN


No.	Nama	Usia	Pekerjaan		Alamat
			Dulu	Sekarang	
1.	Nani Sumarni	77	Pelajar SGB I 1954-1958	Pensiunan Guru	Ds. Situraja Utara Kec. Situraja Kab. Sumedang
2.	Uyi	77	Pelajar SGB IV 1954-1958	Pensiunan Guru	Ds. Situraja RW.01 Kec. Situraja Kab. Sumedang
3.	S.R. Tejasukmana	81	Pelajar SGB V 1952-1956	Pensiunan Guru	Ds. Situraja RW.02 Kec. Situraja Kab. Sumedang
4.	Jono Salno	78	Pelajar SGB V 1953-1957	Pensiunan Guru	Ds. Situraja Utara Kec. Situraja Kab. Sumedang
5.	Acih	78	Pelajar SGB Situraja 1954-1958	Pensiunan Guru	Ds. Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang
6.	Sarip	77	Pelajar SGB Situraja 1955-1959	Pensiunan Guru	Ds. Situraja RW.01 Kec. Situraja Kab. Sumedang

Yogyakarta, 8 September 2017

Pembimbing

Reviewer


Danar Widiyanta, M. Hum.
NIP. 19681010 199403 1 001


Ririn Darini, M. Hum.
NIP. 197411181999032001